



SIARAN PERS

RAPBN 2008:

Memelihara Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan

Pemerintah melakukan Reorientasi Prioritas, Efisiensi dan Efektivitas Belanja untuk Mencapai Target Pertumbuhan 6,8 persen, Perbaikan Infrastruktur dan Peningkatan Program Pendidikan serta Kesehatan

Jakarta, 16 Agustus 2007 - RAPBN 2008 adalah kelanjutan upaya sistematis dari implementasi visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN menetapkan tiga agenda penting, yaitu: *(i)* Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; *(ii)* Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; *(iii)* Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dituangkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah dan APBN.

Tema pembangunan tahun 2008 adalah "Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan". Dalam RKP 2008 ditetapkan delapan prioritas pembangunan nasional, yaitu: *(1)* peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; *(2)* revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; *(3)* percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; *(4)* peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; *(5)* peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; *(6)* pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; *(7)* penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan *(8)* penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Presiden RI dalam pengantar Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun 2008 tadi pagi menyampaikan: "Perbaikan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama, dan menjadi sendi penting bagi kemajuan bangsa..... Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat kita, peranan anggaran dan belanja pemerintah sangat penting."

Untuk mencapai tujuan itu, RAPBN 2008 dirancang melalui perubahan politik anggaran yang sangat mendasar yaitu dengan peningkatan efisiensi dan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, yang diikuti dengan penajaman efisiensi dan efektifitas belanja modal. Hasil efisiensi dan penghematan itu kemudian dialihkan kepada belanja modal dan sosial pada tiga komponen utama yaitu:

- Upaya pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015.
- Upaya mendorong pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% tahun 2008 – dari perkiraan pencapaian sebesar 6,3 % selama tahun 2007- yang disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan dengan meningkatkan belanja untuk membangun dan memperbaiki pembangunan infrastruktur.
- Upaya terus menerus untuk memperbaiki kualitas birokrasi, penegakan hukum dan perbaikan keamanan serta pertahanan nasional.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden, struktur RAPBN 2008 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan pemerataan – *growth with equity*. Refleksi ini juga tertuang dalam penetapan sasaran penurunan pengangguran pada akhir tahun 2008 menjadi 8-9% dibanding 9,7% pada Februari 2007 dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 15-16% pada tahun 2008 dari 16,7 (Maret 2007).

ASUMSI MAKRO 2006 - 2008

Uraian	2006 Real	2007		2008 RAPBN
		APBN	RAPBN-P	
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto:				
Pertumbuhan (%)	5,48	6,3	6,3	6,8
Nominal (Rp Triliun)	3.338,2	3.531,1	3.804,2	4.306,6
PDB per kapita (dalam US\$)	1.643	1.704	1.858	2.077
Inflasi (%)	6,6	6,5	6,5	6,0
Nilai Tukar (Rp/US\$1)	9.164	9.300	9.100	9.100
Tingkat bunga SBI rata-rata (%)	11,74	12,0	8,0	7,5
Harga minyak ICP (US\$/barel)	63,8	64,0	60	60
Lifting (MBCD)	0,959	1,0	0,95	1,034
Pengangguran	10,31 ¹			8 - 9
Kemiskinan	17,8 ²			15 - 16,8

Sumber: Departemen Keuangan, BPS, RKP 2008

1. Agustus 2006

2. Maret 2006

Nota Keuangan RAPBN 2008 tonggak awal perbaikan transparansi anggaran pemerintah

Nota Keuangan RAPBN 2008 disajikan secara lebih rinci, komprehensif dan transparan. Kondisi dan proyeksi ekonomi yang melandasi penyusunan APBN dijelaskan secara lengkap, begitu pula berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah yang berpengaruh pada rincian pendapatan dan belanja negara, serta pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan tuntutan dari para pemangku kepentingan, diantaranya: DPR, para pelaku ekonomi, lembaga pemeringkat, lembaga-lembaga internasional, serta masyarakat terhadap kebutuhan akan informasi yang lebih lengkap dan akurat serta keinginan Pemerintah atas peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pokok-pokok Pembaharuan yang disajikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2008 diantaranya meliputi: (i) Kondisi dan proyeksi ekonomi yang melandasi penyusunan RAPBN dijelaskan secara lengkap; (ii) Berbagai langkah kebijakan yang akan dilaksanakan

pemerintah dijelaskan secara rinci pengaruhnya terhadap pendapatan dan belanja negara, serta pembiayaan; dan (iii) Elemen ketidakpastian dan risiko fiskal, baik yang dihadapi APBN yang sedang berjalan maupun yang akan datang, terutama yang terkait dengan perubahan asumsi dan indikator ekonomi makro, pelaksanaan program penjaminan infrastruktur, program *Public Service Obligation*, kondisi kesehatan BUMN, terjadinya bencana alam, serta rencana kebijakan pensiun dan jaminan sosial, akan disajikan.

Pembaharuan ini diharapkan dapat semakin memberikan gambaran yang lengkap dan proporsional kepada masyarakat luas, maupun para pengambil keputusan dalam menyimak, menganalisa, dan mengikuti pelaksanaan APBN. Pemerintah percaya bahwa dengan informasi yang makin transparan dan akurat, yang dipahami oleh seluruh masyarakat dan pengambil keputusan, maka ketidakpastian akan makin berkurang dan efisiensi keseluruhan perekonomian akan dapat meningkat

Realokasi anggaran pemerintah kearah pengeluaran yang lebih produktif menjadi ciri utama RAPBN 2008

Pemerintah melalui RAPBN 2008 berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran secara konsisten. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan secara drastis belanja modal dari Rp 68,3 trilyun (APBN-P 2007) menjadi Rp 101,5 trilyun (RAPBN 2008) atau meningkat 48,6%. Bersamaan pula, belanja barang diusulkan untuk diturunkan menjadi Rp 52,4 trilyun dibandingkan belanja barang dalam APBN-P 2007 sebesar Rp 62,5 trilyun.

Pengeluaran Infrastruktur meningkat signifikan

Pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja mendapat perhatian pemerintah mengingat fondasi utama untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi jika terjadi peningkatan stok dan perbaikan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu sebagian besar tambahan biaya modal digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pelabuhan dan bandar udara, jaringan kereta api serta pembangkit listrik dan jaringan transmisi dan distribusi listrik.

Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur terlihat dari peningkatan anggaran dua departemen yang mengelola infrastruktur yaitu Departemen Pekerjaan Umum naik sebesar 41,1 % menjadi Rp 35,6 trilyun dan Departemen Perhubungan meningkat sebesar 64,1% menjadi Rp 16,2 trilyun dari perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007. Sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,6 trilyun

Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga Miskin semakin Diprioritaskan

Walaupun tingkat kemiskinan dalam tahun 2007 telah mengalami penurunan, jumlah keluarga miskin khususnya di daerah pedesaan masih besar. Kondisi ini diperburuk oleh fakta sebagian keluarga Indonesia yang berada di sekitar garis kemiskinan sangat rentan terhadap pelbagai goncangan ekonomi.

Upaya untuk mengangkat keluarga Indonesia dari jurang kemiskinan makin diperkuat dengan perluasan cakupan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah diluncurkan sejak tahun 2007 tahun lalu dari 2.831 kecamatan menjadi 3800 kecamatan. Upaya ini dilakukan dengan melakukan konsolidasi program kemiskinan di pelbagai Departemen terutama di tiga kementerian yaitu Depdagri, Departemen PU dan Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Dana yang dialokasikan meningkat dari Rp 3,9 trilyun (2007) menjadi Rp 7,0 trilyun. Peningkatan anggaran memungkinkan pula

peningkatan secara bertahap alokasi per kecamatan dari Rp 500 juta menjadi Rp 3 milyar per kecamatan pada tahun 2008-2009.

Di samping PNPM, pos pemerintah untuk melindungi keluarga miskin dan peningkatan akses keluarga miskin juga dipertahankan dan sekaligus diperkuat. Program-program tersebut antara lain:

- Melanjutkan Program Keluarga Harapan dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersyarat yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan dan Gizi. Program ini dimulai tahun ini dan dilanjutkan tahun depan dengan *pilot project* pada 49 Kabupaten di 7 propinsi mencakup 500 ribu rumah tangga miskin dengan biaya sebesar Rp 1,1 trilyun per tahun;
- Program stabilisasi harga bahan pokok sebesar Rp 447 milyar;
- Program beras untuk keluarga miskin dengan keluarga sasaran sebanyak 12.1 juta dan masing-masing keluarga akan mendapatkan alokasi 10 kg selama 11 bulan dengan total anggaran Rp 5,5 trilyun;
- Asuransi Kesehatan yang mencakup 60 juta orang miskin, akses pelayanan kesehatan pada Posyandu, Puskesmas dan Kelas III RS Pemerintah dan RS Swasta yang ditunjuk Pemerintah;
- Pembebasan biaya pendidikan secara terbatas (BOS) untuk pendidikan 9 tahun dan pemberian subsidi biaya pendidikan untuk siswa miskin SLTA;
- Perbaikan fasilitas sanitasi dan akses air bersih;
- Subsidi Bunga Kredit Pemilikan Rumah Sederhana termasuk Rusunami sebesar Rp 800 milyar.

Pemerintah juga masih mempertahankan subsidi BBM dan listrik dalam proporsi yang cukup besar. RAPBN 2008 masih mempertahankan subsidi BBM hingga Rp 46,7 trilyun dan subsidi LPG Rp 2,4 trilyun. Sebagian besar subsidi BBM digunakan untuk subsidi minyak tanah yang banyak dikonsumsi oleh keluarga miskin. Di samping itu untuk subsidi listrik pemerintah menyediakan Rp 27,8 trilyun. Untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik, pemerintah sedang menggiatkan penggunaan sumber energi alternatif di luar BBM termasuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik non BBM dan program pengembangan *biofuel* yang didorong dengan penyediaan subsidi kredit program *biofuel* sebesar Rp 449 milyar.

Pemerintah menyadari bahwa kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan dimana sektor pertanian menjadi sumber utama penerimaan keluarga miskin. Peningkatan alokasi untuk sektor pedesaan dan pertanian terlihat dalam peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yaitu Rp 15,3 trilyun (RAPBN 2008) terdiri dari Rp 8,9 trilyun anggaran Departemen Pertanian dan Rp 6,4 trilyun melalui anggaran subfungsi pengairan. Petani juga menikmati pelbagai subsidi langsung dan spesifik dalam bentuk subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi benih berjumlah Rp 10,1 trilyun atau meningkat 21,9% dibandingkan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007. Proteksi terhadap petani akan bertambah besar jika subsidi raskin yang merupakan bagian dari kebijakan penyangga harga beras diperhitungkan sebagai subsidi tidak langsung kepada petani.

Pembangunan Manusia Indonesia menjadi Prioritas Utama

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar sebagai cerminan dari prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan sesuai dengan amanat konstitusi. Peningkatan alokasi ini ditujukan untuk memenuhi target penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan melalui kelanjutan pemberian sekolah gratis secara terbatas dan beasiswa pendidikan khusus bagi keluarga miskin. Pada tahun 2008 mendatang fungsi pendidikan akan mendapatkan alokasi 10,9% dari total belanja

pemerintah pusat. Total belanja pemerintah pusat untuk sektor pendidikan mencapai Rp 61,4 trilyun meningkat dari Rp 52,4 trilyun (RAPBN-P 2007).

Alokasi ini hanya merupakan 12,3% dari APBN jika mengikuti definisi yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, jumlah ini akan bertambah besar jika alokasi dalam Dana Alokasi Khusus dan DAU baik dalam bentuk gaji maupun yang ditujukan untuk rehabilitasi gedung SD dan pengadaan peralatan sekolah yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah juga turut diperhitungkan.

Sebagai catatan, menggunakan definisi pengeluaran pendidikan dalam arti luas – yang lazim digunakan secara internasional – total pengeluaran pendidikan secara total sudah mencapai 4,1% dari PDB pada tahun 2007 dan mendekati norma yang berlaku secara internasional yaitu 5% dari PDB. Untuk tahun 2008 besarnya pengeluaran dengan definisi luas ini baru diketahui setelah daerah menyelesaikan RAPBD-nya.

Hal yang sama juga dilakukan dalam penetapan alokasi untuk fungsi kesehatan yang mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu 4,3% lebih tinggi dari RAPBN-P 2007 yaitu dari Rp 16,1 trilyun menjadi Rp 16,8 trilyun. Pengeluaran untuk sektor kesehatan ini dilakukan dengan melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga generasi Indonesia mendatang bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Komitmen memperbaiki governance melalui reformasi birokrasi dan peningkatan anggaran untuk penegakan hukum

Alokasi RAPBN 2008 juga menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki *governance* dalam rangka penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Hal ini tercermin dalam beberapa hal, antara lain dalam usulan Pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 20%, pembayaran gaji ke 13 serta peningkatan tunjangan uang makan menjadi Rp 15 ribu per hari kerja/orang. Penyesuaian gaji ini diharapkan akan meningkatkan *Take Home Pay* minimal untuk PNS golongan terendah (Golongan Ia dengan masa jabatan 10 tahun dan status tidak kawin) menjadi Rp 1,6 juta/bulan pada tahun 2008 atau naik hampir 3 kali lipat dibandingkan THP yang diterimanya pada tahun 2005.

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah secara signifikan juga terjadi untuk hampir semua institusi dalam bidang perbaikan *governance* penegakan hukum (BPK, MA, Departemen Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung). Kenaikan anggaran untuk lembaga penegak hukum untuk tahun 2008 yang cukup besar pada tahun ini diharapkan akan memberikan daya gerak yang lebih kuat dalam upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Anggaran Pertahanan dan Keamanan menuju tingkat yang ideal

Wujud alokasi pengeluaran RAPBN 2008 menekankan pula agenda penciptaan Indonesia yang damai. Hal ini tercermin dengan meningkatnya anggaran pertahanan dan keamanan yang dikelola oleh TNI dan POLRI. Di samping digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, sebagian besar peningkatan anggaran pertahanan dan POLRI digunakan untuk menaikkan tunjangan uang makan/lauk pauk dari Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu per hari dan rehabilitasi asrama TNI dan POLRI di seluruh Indonesia. Pembelian peralatan pun diupayakan agar menggunakan produk-produk dari industri dalam negeri seperti PT DI, PT PAL dan PT PINDAD. Untuk menunjang pengembangan industri pertahanan tersebut pemerintah sedang melakukan upaya menambah sumber pembiayaan bagi industri

pertahanan tersebut dari perbankan domestik dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah tentang pembiayaan anggaran dari perbankan domestik.

Belanja untuk Daerah terus meningkat pula

Peningkatan anggaran juga terjadi dalam belanja pemerintah daerah. Belanja ke Daerah meningkat dari Rp 252,5 trilyun menjadi Rp 271,8 trilyun. Kenaikan ini merefleksikan keinginan untuk mewujudkan agar proses desentralisasi dan otonomi daerah dapat benar-benar terwujud.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana otonomi khusus Propinsi Papua dan NAD sebesar 2% dari DAU sehingga total Dana Otonomi Khusus melonjak 100 % dibandingkan RAPBN-P 2007.

Pemerintah juga melakukan realokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK sebesar Rp 4 trilyun sehingga total DAK tahun 2008 mendatang diusulkan meningkat menjadi Rp 21,2 trilyun.

Harapan lain peningkatan belanja ke daerah ini agar Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat mengurangi berbagai pungutan yang membebani dunia usaha dan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian kepada dunia usaha dan ekonomi biaya tinggi.

Sumber Pembiayaan APBN makin mengandalkan sumber dalam negeri terutama Pajak

Sumber Pembiayaan RAPBN akan berasal dari peningkatan penerimaan dalam negeri baik pajak maupun penerimaan bukan pajak. Rasio penerimaan pajak dalam RAPBN 2008 meningkat dari 12,9% dari PDB dalam RAPBN-P 2007 menjadi 13,6% dari PDB (RAPBN 2008). Sedangkan rasio penerimaan pajak non migas menjadi sebesar 12,6% dari PDB (RAPBN 2008) dari 11,9% dari PDB dalam APBN(P) 2007.

Dengan rasio penerimaan pajak tersebut, total pendapatan negara dan hibah diproyeksikan akan berjumlah Rp 761,4 trilyun atau naik 11,2% dibandingkan perkiraan realisasi dalam APBN-P 2007.

Dengan tambahan penerimaan tersebut, defisit anggaran dalam RAPBN 2008 dapat dipertahankan menjadi 1,7% dari PDB. Defisit ini yang disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta makin banyaknya pembayaran kembali utang pemerintah, memungkinkan rasio utang terus mengalami penurunan menjadi 33% dari PDB pada akhir tahun 2008 dibandingkan 35.6 % perkiraan tahun 2007.

Dalam RAPBN 2008, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara netto direncanakan mencapai Rp91,7 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari (i) penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iii) menggunakan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia; dan (iv) privatisasi. Sumber pembiayaan privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah untuk upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat UU Nomor 19 tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar negatif Rp 16,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp 43,0 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 59,7 triliun.

RINGKASAN, RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008 (dalam triliun rupiah)			
	2007		2008
	APBN	RAPBN-P	RAPBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	723,1	684,5	761,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	720,4	681,8	759,3
1. Penerimaan Perpajakan	509,5	489,9	583,7
<i>Tax Ratio (% thd PDB)</i>	13,5	12,9	13,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	210,9	191,9	175,6
II. Hibah	2,7	2,7	2,1
B. Belanja Negara	763,6	746,4	836,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	504,8	493,9	564,6
II. Belanja Ke Daerah	258,8	252,5	271,8
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(40,5)	(62,0)	(75,0)
<i>% Thd PDB</i>	(1,1)	(1,6)	(1,7)
D. Pembiayaan (I + II)	40,5	62,0	75,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	55,1	74,6	91,7
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(14,6)	(12,6)	(16,7)

pertumbuhan ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Di samping dengan stimulus fiskal di atas, upaya-upaya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan ekspor lebih ditekankan pada reformasi bidang ekonomi mikro sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2007.

Fokus reformasi bidang ekonomi mikro bersandar pada empat kelompok utama, yaitu (i) perbaikan iklim investasi dan berusaha dan (ii) percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia (iii) reformasi sektor keuangan dan (iv) pemberdayaan UMKM.

Fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan di atas hanya bisa tercapai jika stabilitas ekonomi makro tercapai. Lonjakan inflasi yang terjadi selama tahun 2005 yang lalu diharapkan dapat distabilkan dengan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, termasuk jika perlu pembukaan kembali keran impor beras. Langkah-langkah demikian diharapkan akan menstabilkan inflasi selama tahun 2008 kembali berada di sekitar 6% seperti yang tercantum dalam asumsi RAPBN 2008.

Terakhir, RAPBN 2008 ini juga memiliki sejumlah risiko fiskal seperti ketidaksesuaian asumsi makro, risiko-risiko berkaitan dengan posisi utang pemerintah, risiko proyek pembangunan infrastruktur, risiko pemilikan BUMN, risiko program pensiun, risiko desentralisasi fiskal dan risiko Bank Indonesia. Rincian dari masing-masing risiko ini diuraikan dalam Bab VI Nota Keuangan dan RAPBN 2008.

===***===